

Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2008-2021

Fransiska Rosmilin Cendy Sawa¹, Novi Maulida Ni'mah², Candra Ragil³

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta; Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY
Telp. (0274) 485390 Fax. (0274) 487249

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP ITNY

e-mail: ¹chendyrosmilin@gmail.com, ²novimaulida@itny.ac.id, ³candraragil@itny.ac.id

Abstrak

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan setelah pemekaran wilayah. Penyebab perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo salah satunya adalah akibat pemekaran wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo dari tahun 2008-2021 setelah pemekaran wilayah dan mengidentifikasi faktor utama yang menjadi penyebab perubahannya di setiap kecamatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis SIG dan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dalam menentukan faktor utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2008-2021 wilayah tersebut mengalami beberapa perubahan penggunaan lahan yang terlihat dan bervariasi, terlebih pada penggunaan lahan semak belukar yang berkurang sekitar 4,26% dan lahan pertanian yang bertambah sebanyak 5,81%. Lahan hutan bertambah sebanyak 0,73%, lahan mangrove berkurang sebanyak 0,07%, lahan padang rumput berkurang sebanyak 2,67%, lahan permukiman bertambah sebanyak 0,44% dan lahan rawa bertambah sebanyak 0,005%. Faktor utama penyebab perubahan penggunaan lahan di setiap kecamatan memiliki perbedaan tetapi didominasi oleh faktor peluang ekonomi. Yang mana terdapat 4 kecamatan yang faktor utamanya adalah peluang ekonomi yaitu Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Mauponggo. Faktor utama Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae yaitu faktor aksesibilitas. Dan Kecamatan Wolowae faktor utamanya adalah sosial ekonomi.

Kata kunci— Penggunaan lahan, Sistem Informasi Geografi (SIG), Analytical Hierarchy Process

Abstract

Land use change is basically inevitable in the implementation of development after the expansion of the territory. One of the causes of land use change in Nagekeo Regency is due to regional expansion. The purpose of this study is to identify land use changes in Nagekeo District from 2008-2021 after regional expansion and identify the main factors that cause changes in each sub-district. The research method used is a qualitative method with GIS analysis and AHP (Analytic Hierarchy Process) method in determining the main factors. The results showed that in the period 2008-2021 the area experienced several visible and varied land use changes, especially in bush land use which decreased by around 4.26% and agricultural land which increased by 5.81%. Forest land increased by 0.73%, mangrove land decreased by 0.07%, pasture land decreased by 2.67%, residential land increased by 0.44% and swampland increased by 0.005%. The main factors causing land use change in each sub-district have differences but are dominated by economic

opportunity factors. There are 4 sub-districts whose main factor is economic opportunity, namely South Aesesa District, Keo Tengah District, Nangaroro District, and Mauponggo District. The main factor of Aesesa District and Boawae District is the accessibility factor. And Wolowae sub-district is the main factor is socio-economic

Keywords— *Land use, Geographic Information Systems (GIS), Analytical Hierarchy Process*

1. PENDAHULUAN

Perubahan penggunaan lahan merupakan peningkatan suatu jenis penggunaan lahan dan terjadi penurunan jenis penggunaan lahan tertentu dari waktu ke waktu berdasarkan periode tertentu (Eko T dkk., 2012). Dengan terdapatnya perubahan dan pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah atau negara cenderung akan terus tumbuh, baik bertambah ukurannya maupun strukturnya yang mengalami perubahan (Hidayat, 2021). Oleh karena itu perubahan guna lahan selalu terjadi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial ekonomi yang searah dengan perubahan penduduk suatu kota. Bertambahnya penduduk dan semakin maraknya berbagai jenis aktivitas masyarakat di suatu wilayah memberikan dampak juga pada meningkatnya perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Pertumbuhan dan perubahan suatu wilayah dapat mengakibatkan pemekaran wilayah daerah.

Pada kasus di Indonesia kebijakan otonomi wilayah mengalami perkembangan sebagai acuan terbentuknya wilayah baru sehingga terjadi pemekaran, penggabungan dan penghapusan di berbagai wilayah. Terbentuknya daerah otonomi baru dapat dilaksanakan jika memenuhi aspek evaluasi seperti kemampuan sosial ekonomi, potensi dan permasalahan wilayah, faktor geografis, kependudukan, politik dan faktor lain yang menjadi pertimbangan dilakukannya otonomi daerah. Pemekaran wilayah sebagai salah satu usaha dalam pemerataan pembangunan, sehingga dapat membentuk daerah yang bisa berkembang dengan mandiri, menghindari efek negatif sosial dan lingkungan, dan meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien.

Otonomi daerah berpeluang membawa dampak positif bagi masyarakat mengingat sumber daya manusia semakin baik, ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat yang menjadi semakin tinggi pada seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan kedepannya. Dalam PP 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disebutkan bahwa tujuan dari pemekaran wilayah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada tahun 2006 Kabupaten Ngada mengalami pemekaran menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Pemekaran wilayah ini disetujui oleh DPR dalam RUUnya pada 8 Desember 2006. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007, yang disahkan pada tanggal 22 Mei 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo sebagai daerah otonom. Untuk lingkup wilayahnya meliputi 7 kecamatan yaitu: Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, Nangaroro, Wolowae, Keo Tengah dan Mauponggo. Pemekaran wilayah ini tujuannya untuk pemeratakan pembangunan di setiap wilayah sehingga dapat memperlancar mobilitas, aksesibilitas, pelaksanaan tugas pemerintah dalam berbagai bidang pelayanan. Pemekaran dan pembentukan beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Nagekeo menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang kuat agar dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin baik, memperpendek jarak pelayanan, membuka ruang partisipasi yang semakin luas dan memacu pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan ekonomi daerah setempat.

Dengan adanya pemekaran itu terjadi beberapa perubahan dan pertumbuhan di wilayah Kabupaten Nagekeo, walaupun pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Nagekeo bisa dikatakan lumayan lambat karena kurangnya dana serta SDM yang ada. Munculnya berbagai aktivitas yang ramai dan terjadinya migrasi penduduk hal ini menyebabkan jumlah penduduknya

terus bertambah. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagekeo, jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo tahun 2008 adalah 132.458 jiwa dan jumlah penduduk di tahun 2021 adalah 159.732 jiwa. Dengan presentase pertumbuhan penduduk yaitu 1,45%. Pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berpengaruh pada ketersediaan kebutuhan ruang sebagai tempat hidup dan tinggal, lokasi bekerja, dan menjalani aktivitas lainnya, namun di sisi lain ketersediaan lahan justru yang semakin terbatas menjadikan berbagai masalah timbul terkait penggunaan lahan.

Setiap pembangunan harapannya akan memberikan dampak positif, perubahan penggunaan lahan untuk fungsi tertentu perlu dikendalikan agar tidak menghasilkan dampak negatif sosial dan lingkungan yang signifikan. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi tentang perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Nagekeo yang nantinya dapat menjadi suatu informasi untuk merencanakan tata ruang dimasa dan generasi mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi studi pada penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, tahapan penelitian, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa citra satelit dan data *shapefile* (SHP) penggunaan lahan 2008-2021, kondisi geografis, kependudukan, sarana prasarana. Data penilaian pembobotan AHP diperoleh dari responden yang dipilih secara *purposive sampling* yang artinya responden dipilih secara purposif sesuai dengan tujuan peneliti.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu survei primer dan survei sekunder berupa observasi, dokumentasi, wawancara dengan kuisioner, dan tinjauan literatur.

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data

No	Sasaran	Teknik Pengumpulan Data
1	Identifikasi kondisi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo tahun 2008-2021	Data primer : Observasi Dokumentasi Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini adalah citra satelit Kabupaten Nagekeo tahun 2008, 2021 yang di ambil dari Google Earth dan shp penggunaan lahan Kabupaten Nagekeo
2	Identifikasi faktor utama pengaruh perubahan penggunaan lahan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Nagekeo	Observasi, Wawancara dan Tinjauan literatur

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.2 Analisis Data

- Analisis sistem informasi geografis (SIG), untuk mengetahui kondisi perubahan penggunaan lahan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui digitasi on screen dilanjutkan dengan melakukan *overlay* dengan bantuan *software* ArcGis 10.8 di wilayah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2008-2021.
- Analisis AHP, untuk mengetahui faktor utama yang dapat memberikan pengaruh pada perubahan penggunaan lahan. Faktor utama memberikan pengaruh pada perubahan penggunaan lahan di setiap kecamatan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) yang mana didapatkan dari perhitungan pada *microsoft office excel* dengan data penilaian dari responden kemudian dikompilasi datanya. Berdasarkan rekapitulasi data hasil penyebaran kuisioner, telah didapatkan hasil perhitungan untuk

menentukan faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di setiap kecamatan. Data nilai perbandingan yang di dapatkan dari ke-3 responden dilakukan perataan dengan *geometric mean*, selanjutnya hasilnya di masukkan ke dalam matriks perbandingan berpasangan. Hasil dari perbandingan berpasangan kemudian dinormalisasikan, cara melakukan penormalisasian yaitu dengan membagi nilai pada matriks kolom pertama baris pertama dengan jumlah dari kolom tersebut hal tersebut dilakukan sesuai dengan jumlah matriks yang ada, yang kemudian hasil normalisasi tersebut selanjutnya dijumlahkan dan dibuat rata-rata nilainya untuk mendapatkan nilai *vector eigen*. Nilai *vector eigen* ini merupakan bobot prioritas yang nantinya digunakan untuk menentukan faktor utamanya. Langkah terakhir yaitu menghitung rasio konsistensi matriks tersebut yang dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menghitung nilai λ_{maks} , selanjutnya menghitung nilai *Cl*, dan yang terakhir menghitung nilai *CR*nya. Nilai perbandingan pada matriks tersebut akan dianggap konsisten apabila nilai *CR*nya $< 0,1$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo

A. Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2008

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2008 lebih dominan digunakan sebagai semak belukar dengan luas penggunaan 615,234 km² (43,43%), penggunaan lahan terbesar kedua yaitu padang rumput berjumlah 386,81 km² (27,30%), selanjutnya adalah lahan pertanian sebanyak 281,398 km² (19,86%), hutan dengan luas penggunaan lahan 95,174 km² (6,72%), diikuti dengan permukiman dengan luas lahan 19,171 km² (1,35%), rawa dengan luas penggunaan lahan 11,169 km² (0,79%), dan yang terakhir adalah mangrove dengan luas penggunaan lahan 7,765 km² (0,55%) dari total luas penggunaan lahan yang ada. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada peta dan tabel berikut.

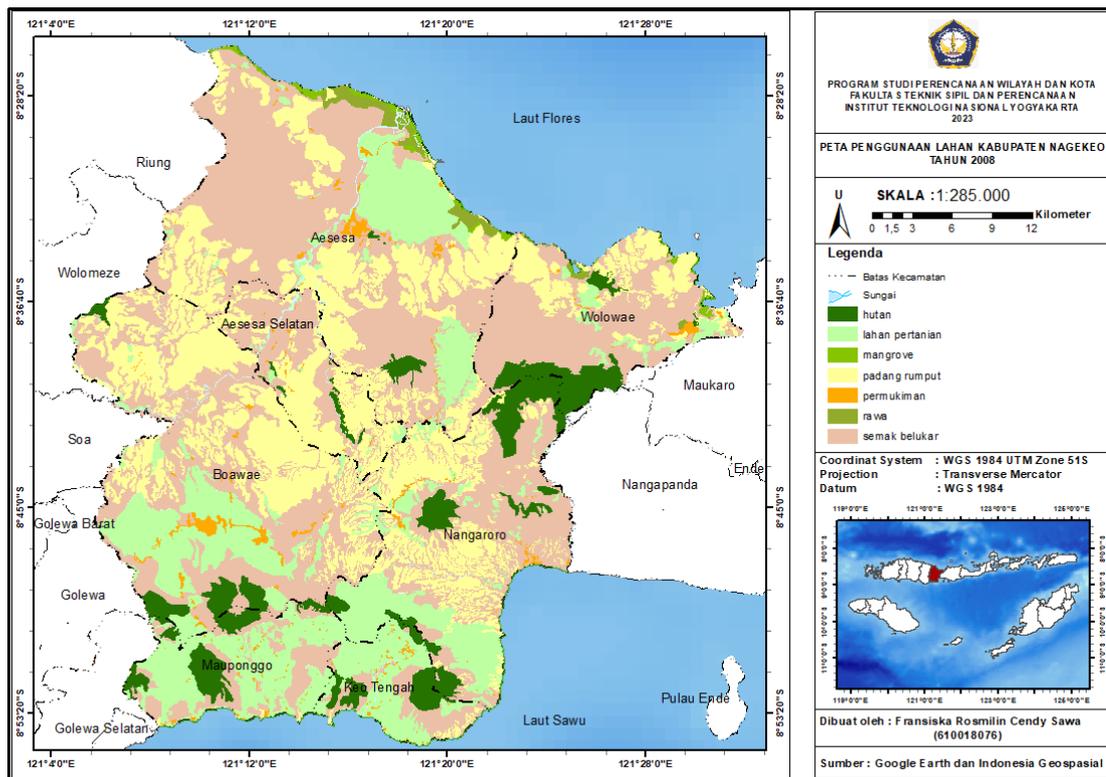
Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2008

No	Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Km ²)	Presentase (%)
1	Hutan	95,174	6,72%
2	Lahan pertanian	281,398	19,86%
3	Mangrove	7,765	0,55%
4	Padang rumput	386,81	27,30%
5	Permukiman	19,171	1,35%
6	Rawa	11,169	0,79%
7	Semak belukar	615,234	43,43%
Jumlah		1416,721	100%

Sumber: Hasil analisis, 023

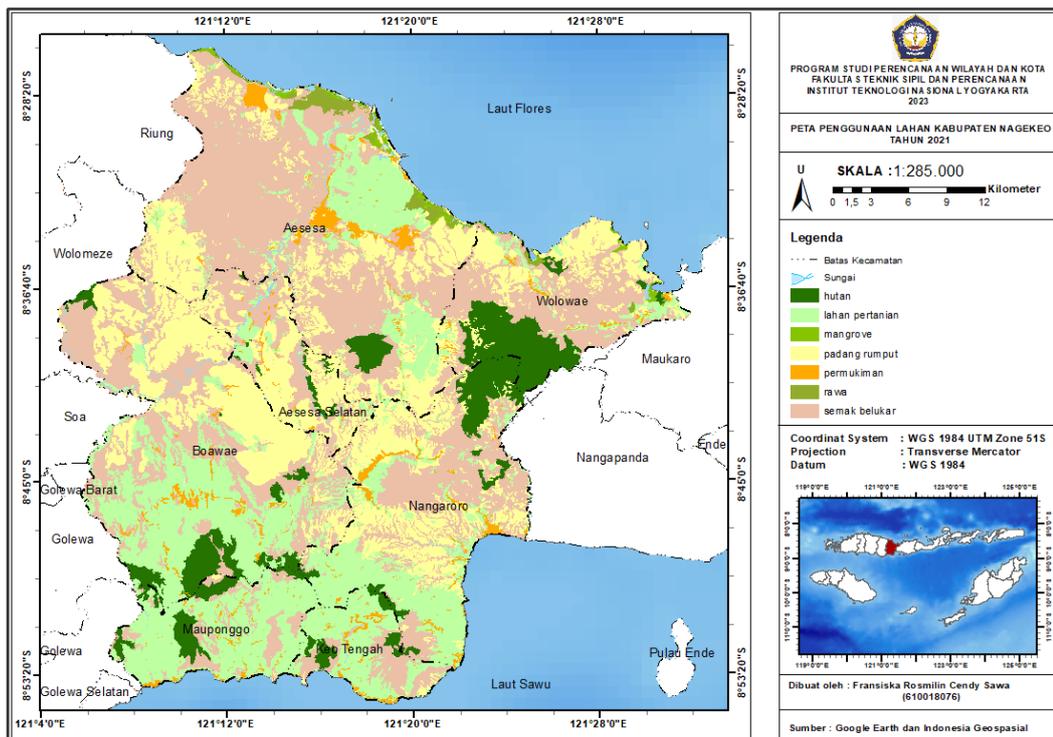
B. Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

Penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Nagekeo dominan digunakan sebagai semak belukar dengan luas penggunaan lahan yaitu 554,911 km² (39,2%), selanjutnya diikuti dengan penggunaan lahan sebagai lahan pertanian dengan luas penggunaan lahan 363,656 km² (25,7%), berikutnya adalah padang rumput dengan luas penggunaan lahannya yaitu 348,992 km² (24,6%), kemudian hutan dengan luas penggunaan lahan 105,57 (7,5%), permukiman dengan luas penggunaan lahan sebanyak 25,394 km² (1,8%), selanjutnya ada rawa dengan luas penggunaan lahan yaitu 11,236 km² (0,8%), dan yang terakhir adalah mangrove dengan luas penggunaan lahannya adalah 6,785 km² (0,5%). Untuk selengkapnya dapat disimak pada tabel dan peta di bawah ini.



Sumber: Hasil analisis, 2023

Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2008



Sumber: Hasil analisis, 2023

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

Tabel 3. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

No	Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Km ²)	Presentase (%)
1	Hutan	105,57	7,5%
2	Lahan pertanian	363,656	25,7%
3	Mangrove	6,785	0,5%
4	Padang rumput	348,992	24,6%
5	Permukiman	25,394	1,8%
6	Rawa	11,236	0,8%
7	Semak belukar	554,911	39,2%
Jumlah		1416,544	100%

Sumber: Hasil analisis,2023

3.2 Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2008-2021

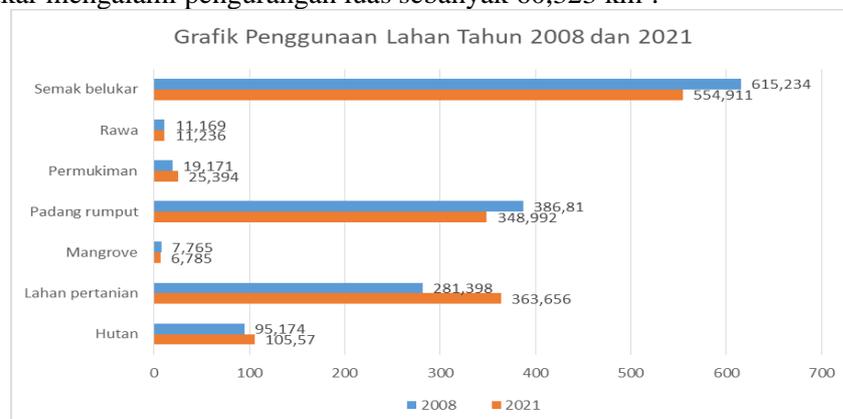
Penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo dilihat berdasarkan hasil digitasi citra *google earth* sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 terdapat beberapa perubahan. Berikut ini akan disajikan tabel perubahan luas penggunaan lahan dari tahun 2008 – 2021.

Tabel 4. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2008 dan 2021

No	Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Km ²)		Perubahan Penggunaan Lahan	
		2008	2021	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Hutan	95,174	105,57	+10,396	+0,73%
2	Lahan pertanian	281,398	363,656	+82,258	+5,81%
3	Mangrove	7,765	6,785	-0,9800	-0,07%
4	Padang rumput	386,81	348,992	-37,818	-2,67%
5	Permukiman	19,171	25,394	+6,223	+0,44%
6	Rawa	11,169	11,236	+0,067	+0,005%
7	Semak belukar	615,234	554,911	-60,323	-4,26%

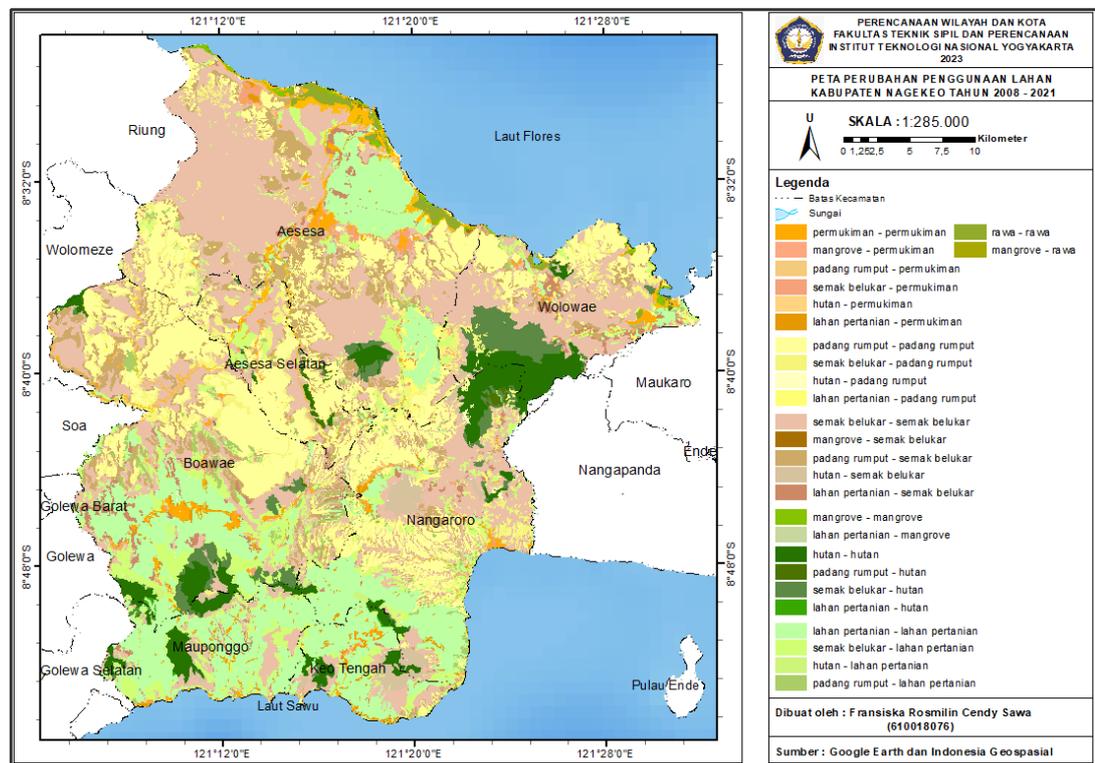
Sumber: Hasil analisis,2023

Dari tabel perubahan penggunaan lahan di atas, dapat dipahami bahwa pada tahun 2008 – 2021 terjadi peningkatan penggunaan lahan seluas 101,144 km², yaitu: pada lahan hutan bertambah luas 10,396 km², lahan pertanian bertambah luas sebanyak 82,258 km², selanjutnya ada permukiman yang bertambah luas sebanyak 6,223 km², dan yang terakhir ada rawa yang bertambah luas sebanyak 0,067 km². Selain peningkatan luas penggunaan lahan, penggunaan lahan yang ada juga mengalami pengurangan luasnya. Diantara itu penggunaan lahan yang mengalami pengurangan luas antara lain mangrove yang mengalami pengurangan luas sebanyak 0,98 km², penggunaan lahan padang rumput mengalami pengurangan sebanyak 37,818 km², dan penggunaan lahan semak belukar mengalami pengurangan luas sebanyak 60,323 km².



Sumber: Hasil analisis,2023

Gambar 3. Grafik Penggunaan Lahan Tahun 2008 dan 2021



Sumber: Hasil analisis,2023
Gambar 4. Peta Perubahan Guna Lahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2008-2021

3.3 Faktor Utama Yang Menyebabkan Perubahan Penggunaan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi data penyebaran kuisioner kepada 21 responden yang dibagi menjadi 3 responden di setiap kecamatan, dimana responden sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti, maka diperoleh hasil analisis mengenai faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Dari hasil kajian teori yang terdapat kriteria yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah faktor fisik, sosial ekonomi, peluang ekonomi, tata kelola atau kebijakan dan aksesibilitas. Berikut merupakan hasil perhitungan prioritas bobot kriteria dari setiap kecamatan.

Tabel 5. Bobot Prioritas Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Penggunaan Lahan Dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Nagekeo

Kriteria	Aesesa	Aesesa Selatan	Wolowae	Keo Tengah	Nangaroro	Boawae	Mauponggo
F	0,0958	0,1584	0,1254	0,2056	0,1206	0,156	0,1041
S	0,1773	0,1569	0,3043	0,2104	0,1837	0,1572	0,2272
P	0,2624	0,2889	0,2575	0,3787	0,3199	0,2165	0,3326
T	0,1812	0,2593	0,1577	0,0932	0,0624	0,2074	0,0903
A	0,2832	0,1365	0,1552	0,1121	0,3135	0,2629	0,2459

Sumber: Hasil analisis,2023

Pada tabel diatas didapatkan nilai prioritas bobot untuk masing-masing faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Aesesa adalah faktor aksesibilitas dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0,2832. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Aesesa

merupakan lokasi pusat kegiatan pemerintah dan ekonomi kabupaten dimana aksesibilitas merupakan hal yang penting untuk menunjang semua kegiatan itu. Kota Mbay terletak di Kecamatan Aesesa yang mana kota Mbay merupakan wilayah pengembangan sistem pusat kegiatan di wilayah provinsi sebagai pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp). Wilayah Kecamatan Aesesa juga dilewati jaringan jalan strategis rencana yang meliputi ruas jalan yang menghubungkan Reo – Pota – Weikelambu – Riung – Mboras – Danga – Nila – Aeram – Kaburea – Nabe – Ronokolo – Maurole – Kotabaru – Koro – Magepanda – Maumere di Pulau Flores. Di Kecamatan Aesesa juga terdapat pelabuhan Marapokot yang digunakan sebagai pelabuhan pengumpan dengan alur pelayaran regional. Faktor besar yang dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Aesesa Selatan adalah faktor tata kelola dan kebijakan dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0,2889. Faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Wolowae adalah faktor sosial ekonomi dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0,3043. Menurut responden yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Wolowae adalah faktor sosial ekonomi, yang mana hal ini berhubungan dengan pertumbuhan penduduk, pekerjaan dan penghasilan penduduknya. Jumlah penduduk di Kecamatan Wolowae pada tahun 2021 adalah 6.085 jiwa yang mana bertambah 1.092 jiwa dari tahun 2008 yang berjumlah 4.993 jiwa. Faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Keo Tengah adalah faktor peluang ekonomi dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0,3787. Sebagai wilayah kecamatan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian hal tersebut merupakan sebuah peluang ekonomi, yang mana dapat menjadi usaha dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunannya. Faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Nangaroro adalah faktor peluang ekonomi dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0,3199. Sebagian besar wilayah di Kecamatan Nangaroro digunakan sebagai lahan pertanian kebun dan ladang. Karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sehingga lahan pertanian adalah hal yang utama untuk menunjang pemasukan dan pekerjaan tersebut. Hasil dari pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan lainnya. Lahan pertanian yang ada merupakan sumber ekonomi masyarakat, dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan masyarakat semakin menambah lahan pertanian dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kecamatan Nangaroro merupakan kawasan strategis provinsi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Boawae adalah faktor aksesibilitas dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0,2629. Faktor pelengkap antara aksesibilitas lahan dan penggunaan lahan akan mempengaruhi nilai ekonomi suatu lahan. Lahan dengan cakupan lalu lintas yang baik mempunyai nilai ekonomi yang relatif cukup baik karena dapat mengurangi ongkos perjalanan dan waktu perjalanan. Oleh karena itu aksesibilitas yang baik akan meningkatkan nilai lahan, sehingga lahan dengan aksesibilitas yang baik sering di ubah penggunaan lahannya terutama untuk lahan permukiman dan pusat kegiatan. Dalam struktur ruang wilayah RTRW Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Boawae ditetapkan sebagai rencana sistem perkotaan wilayah PKLp yang meliputi wilayah Kelurahan Nagespadhi, Kelurahan Natanage, Kelurahan Olakile, Kelurahan Natanage Timur, Kelurahan Nageoga, Kelurahan Wolopogo, dan Kelurahan Rega. Faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Mauponggo adalah faktor peluang ekonomi dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0,3326. Wilayah di Kecamatan Mauponggo sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan dengan cengkeh, kopi, kakao, dan kelapa merupakan hasil utamanya. Hal ini juga dilihat sebagai adanya peluang ekonomi dimana harga jual untuk hasil-hasil tersebut lumayan untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut juga mendorong masyarakat untuk menambah luas lahan pertanian mereka untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan mereka.

3.4 Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo dan Faktor Pendorongnya

Kabupaten Nagekeo merupakan kabupaten baru hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Ngada. Hal ini menyebabkan pembangunan dan perubahan terus dilakukan dalam rangka membenah dan memajukan Kabupaten Nagekeo. Dari hasil analisis yang telah dilakukan

menggunakan ArcGis, wilayah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2008 masih didominasi oleh semak belukar dan padang, yang mana pembangunan baru dimulai dari wilayah Ibu kota kabupatennya. Perlahan-lahan pembangunan terus dilakukan di Kabupaten Nagekeo mulai dari pembenahan jaringan jalan yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menghubungkan setiap wilayah agar dapat mengembangkan wilayah lainnya. Pada tahun 2021 menurut hasil analisis yang telah dilakukan penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Nagekeo didominasi oleh semak belukar dan lahan pertanian. Walaupun masih didominasi oleh lahan semak belukar, tetapi luas lahannya telah berkurang sekitar 4,26%. Bertambahnya luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Nagekeo ini juga merupakan hasil dari arahan yang ada di Peraturan RTRW Kabupaten Nagekeo, yang mana sebagian besar wilayah di Kabupaten Nagekeo diperuntukan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan ladang.

Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Nagekeo pada dasarnya beragam, mulai dari karena pemekaran wilayah, aksesibilitas, sosial ekonomi, peluang ekonomi, tata kelola dan kebijakan, serta faktor fisik. Perubahan yang terjadi di Kabupaten Nagekeo sebagian besar terjadi karena pengembangan wilayah setelah pemekaran yang diikuti dengan faktor aksesibilitas dan peluang yang ada. Dalam melakukan pengembangan pembangunan wilayahnya hal itu tidak terlepas dari peraturan yang ada seperti RTRW dan RPJMD Kabupaten Nagekeo yang telah diatur dan disusun. Seperti penambahan lahan pertanian merupakan salah satu contoh perubahan penggunaan lahan yang disesuaikan dengan arahan yang ada pada peraturan RTRW Kabupaten Nagekeo.

Pemekaran wilayah Kabupaten Nagekeo merupakan hasil dari rencana dan diskusi yang panjang. Maksud dari pemekaran ini adalah untuk memudahkan akses pelayanan publik, mensejahterakan masyarakat, meratakan dan mempercepat pembangunan wilayahnya serta didukung oleh penetapan wilayah Mbay sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) sehingga dengan memanfaatkan hal ini menjadikan Mbay sebagai pusat kegiatan baru. Hal tersebut dimanfaatkan untuk menguatkan gagasan pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Nagekeo. Dengan pemekaran wilayah baru tersebut mengakibatkan adanya pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya aktivitas di kabupaten baru. Mulai dari pembangunan fasilitas pemerintahan, kesehatan, dan fasilitas penunjang lainnya. Jadi, pemekaran wilayah juga memainkan peranan dalam perubahan penggunaan lahan yang ada. Pembangunan dan perubahan pastinya akan terus dilakukan untuk memajukan wilayahnya. Dampak pemekaran wilayah terhadap perkembangan lahan akan sangat terlihat di wilayah pusat kabupatennya. Dimana sebagai pusat kegiatan dibutuhkan fasilitas penunjangnya. Dalam melakukan pembangunan berbagai masalah timbul karena banyaknya tanah yang ada di Kabupaten Nagekeo merupakan tanah yang diakui sebagai milik suku tertentu, sehingga dalam pembebasan dan pembangunan sering kali terjadi sengketa lahan. Menurut Mali, Fransiskus (2017) masalah yang paling umum terjadi setelah pemekaran wilayah adalah konflik tanah. Hal inilah yang menjadi salah satu dampak negatif dari pemekaran wilayah, yang mana terjadi konflik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah mengenai tanah yang menjadi sasaran pada saat pemekaran wilayah. Karena wilayah baru membutuhkan lahan untuk menunjang pembangunan infrastrukturnya. Dan sampai saat ini masih sering terjadi sengketa lahan di Kabupaten Nagekeo. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara merata dari pusat ibu kota sampai ke wilayah kecamatan terluarnya. Dalam kurun waktu dari tahun 2008-2021 pembangunan di Kabupaten Nagekeo belum dilakukan secara merata karena terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki akses untuk jaringan listrik dan jalan yang memadai, terutama wilayah yang terletak pada daerah dengan topografi puncak dan lereng sehingga masih terdapat wilayah yang merupakan desa dengan klasifikasi sangat tertinggal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Nagekeo mengalami perubahan dari tahun awal pemekaran wilayah karena terjadinya pengembangan pembangunan. Penggunaan lahan di

Kabupaten Nagekeo pada dasarnya didominasi oleh semak-belukar, padang rumput, dan lahan pertanian. Yang mana dari tahun 2008 sampai 2021 lahan semak belukar yang berkurang sekitar 4,26% dan lahan pertanian yang mengalami peningkatan luas sebanyak 5,81%. Lahan hutan mengalami kenaikan sebanyak 0,73%, lahan mangrove mengalami pengurangan sebanyak 0,07%, lahan padang rumput mengalami pengurangan sebanyak 2,67%, lahan permukiman mengalami peningkatan sebanyak 0,44% dan yang terakhir lahan rawa mengalami kenaikan sebanyak 0,005%. Peningkatan yang terjadi pada lahan pertanian dilakukan seiring dengan arahan penggunaan lahan yang terdapat pada RTRW Kabupaten Nagekeo yang mana sebagian besar wilayahnya diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan pertanian hortikultura.

Faktor utama penyebab perubahan penggunaan lahan di setiap kecamatan memiliki perbedaan tetapi didominasi oleh faktor peluang ekonomi. Yang mana terdapat 4 kecamatan yang faktor utamanya adalah peluang ekonomi yaitu Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Keo Tengah, dan Kecamatan Mauponggo. Faktor utama Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae yaitu faktor aksesibilitas. Dan Kecamatan Wolowae faktor utamanya adalah sosial ekonomi.

5. SARAN

Sebagai daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Nagekeo akan terus berkembang yang mana perkembangan itu harus diawasi agar pembangunannya tidak bertabrakan dengan peraturan yang ada oleh sebab itu perlu diperhatikan arahan dan peruntukan penggunaan lahan serta kemampuan lahannya untuk kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga tercinta serta semua pihak yang telah memberi dukungan secara ikhlas terhadap penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan harapannya dapat berguna bagi kontribusi pengembangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2009). Kabupaten Nagekeo Dalam Angka 2009. BPS Kabupaten Nagekeo
- Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Nagekeo Dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Nagekeo
- Eko, T., dkk. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaiannya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4), 330-340.
- Hidayat, Y. T. (2021). Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Skripsi. Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar
- Mali, F. X. G. T. (2017). Konflik Tanah di Daerah Otonom Baru (DOB) Studi Konflik Tanah Pembangunan Kantor DPRD di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sociae Polites*, 18(01), 39-56.